



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 800/ 975 / 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar program dan kegiatan tahunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69 Tahun 2019);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 - 2026;
- 28) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 29) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

30) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023.
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) – SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.5. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi, Uraian dan Rincian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal, 4 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680323 199003 1 012

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, 4 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680323 199003 1 012

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	23
2.3 Hasil evaluasi SAKIP.....	32
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	34
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III.....	56
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	62
BAB IV	64
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
4.1 Program dan Kegiatan.....	64
BAB V.....	78
PENUTUP	78

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan

program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang secara substansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun ke satu periode RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanaan dan sasaran pembangunan Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

- 14) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69 Tahun 2019);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 - 2026;
- 29) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 30) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 31) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- 32) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2023 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 yang disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas Program dan kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2023 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2023 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023 guna mencapai tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.3 Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dalam Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keenam berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan Tahun 2021 sebesar Rp. 8.999.306.000 dan dana DAK sebesar Rp. 372.462.000, sehingga total anggaran Penetapan Tahun 2021 adalah Sebesar Rp. 9.371.768.000 terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 8.770.768.000 dan belanja Modal Sebesar Rp. 601.000.000. Dengan adanya dampak covid-19, diperlukan anggaran untuk mengantisipasi penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 maka dilakukan rasionalisasi Anggaran APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mengalami 3 kali Refocusing anggaran, Pada refocusing Pertama anggaran di potong sebesar Rp. 3.000.000.000, Refocusing 2 di potong sebesar Rp. 150.000.000, dan untuk refocusing 3 di gabung dengan APBD Perubahan di potong sebesar Rp. 753.479.000, Jadi sisa anggaran sebesar Rp. 5.468.289.000.

- Belanja Operasi Rp. 8.770.768.000
- Belanja Modal Rp. 601.000.000 +
- Total Rp. 9.371.768.000

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta

sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
2.18	Bidang Penanaman Modal										
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	20	20	20	1	100	120	1,2	
2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	20	20	20	100	100	120	1,2
01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	10	3	3	3	100	2	5	50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
	Daerah	Perangkat Daerah yang disusun									
01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	5	1	1	1	100	1	2	40
01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	3	3	3	100	1	4	80
01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	1	1	1	100	1	2	40
01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	3	3	3	100	1	4	80
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5	1	1	1	100	1	2	40
01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	2	2	2	100	2	4	40

RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100	20	20	20	1	100	120	1,2
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	126	26	26	26	100	26	52	41,3
02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	1	1	1	100	1	2	40
02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	10	2	2	2	100	2	4	40
02	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	100	20	20	20	1	100	120	1,2
03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	1	1	1	1	100	0	1	100
02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100	20	20	20	1	100	120	1,2

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
		Perangkat Daerah									
05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	900	2	2	2	100	180	182	20,2
05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	540	60	60	60	100	120	180	33,3
02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	20	20	20	1	100	120	1,2
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen listrik yang dibeli	60	12	12	12	100	12	24	40
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor yang dipenuhi	10	2	2	2	100	2	4	40
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dipenuhi	60	12	12	12	100	12	24	40
06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	60	12	12	12	100	12	24	40

RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
		perundang-undangan	perundang undangan yang dipenuhi							
06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi	1.028	8	8	100	255	263	25,5
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	965	125	125	123,2	210	364	37,7
02	07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	20	0	100	100	1
07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	109	0	0	0	24	24	22
02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100	20	20	1	100	120	1,2
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	27.500	5.500	5.500	137	5.500	11.000	40

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20	4	4	4	100	4	8	40
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53	5	5	5	100	12	17	32
02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	20	20	20	1	100	120	1,2
09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	1	1	1	100	1	2	40
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105	22	21	22	105	21	43	41

RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	75	41	15	41	273	15	56	75
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	5	1	1	1	100	1	2	40
09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165	74	33	74	224	33	107	65
02	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Peningkatan jumlah investor	3,20	-40	2,95	-40	13,5	3	-37	11,5
02	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	20	20	20	1	100	120	1,2
01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	10	1	1	1	100	2	3	30

RENJA DPMPSTP TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
	Modal										
01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah monev perusahaan yang dilakukan (kegiatan monev)	89	2	3	2	67	3	5	6
02	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi	100	0	20	0	0	100	100	1
02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan umum penanaman modal yang tersusun	1	0	0	0	0	1	1	100
02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Pelaku Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kajian peta potensi dan peluang usaha yang terlaksana	5	1	1	1	100	1	2	40
03		Program Promosi penanaman Modal	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100	0	100	0	0	100	100	1
02	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah nilai investasi	204.494.536.064	171.698.900.267	168.157.332.081	171.698.900.267	102,1	175.132.878.272	346.831.778.539	170,58

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang terlaksana	5	0	1	0	0	1	1	20
04	Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97	98,71	95	98,71	10,22	95	193,71	199,70	
02	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perijinan yang disetujui	100	20	20	20	1	100	120	1,2
01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	27.500	8.014	5.000	8.014	160	5.250	13.264	48

RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.200	206	240	206	86	240	446	37
01	03	penyediaan Pelayanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	6	4	6	150	4	10	50
01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	375	0	0	0	0	75	75	20
05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	50	85,71	40	85,71	214,2	42	127,71	255,4
02	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	100	20	20	20	1	100	120	1,2

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penanaman Modal									
01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	96	51	22	51	231	22	73	76
01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	45	9	9	9	100	9	18	40
01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	66	50	13	50	384	13	63	95
06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi perijinan		100	160,28	100	160,28	160,28	100	260,28	260,28

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
02	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	20	20	20	1	100	120	1,2
01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	5	1	1	1	100	1	2	40

Dari tabel kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari capaian kinerja yang mencapai 85% ke atas sekitar 92%. Capaian Kinerja yang sangat baik bisa dilihat di Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang mencapai 160%. Hal ini dikarenakan realisasi Ijin Terbit mencapai 8.014 ijin terbit dari target sebanyak 5.000 ijin terbit.

Untuk capaian kinerja dibawah 85% ada di sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan capaian 67%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan PPKM sehingga kegiatan monev ke perusahaan – perusahaan banyak yang tidak terlaksana.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021 secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan (IMB) sebesar Rp.2.040.702.000,- (85,02 %)
- b. Realisasi Belanja Operasi dan Modal Rp.5.160.223.798,- (94,37 %)

Capaian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak tercapai Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pada bulan Agustus Tahun 2021 Izin Mendirikan Bangunan di ganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau biasa di sebut PBG. Dikarenakan belum adanya perda tentang PBG maka izin Persetujuan Bangunan Gedung belum bisa dikeluarkan. Artinya realisasi Retribusi IMB sebesar Rp. 2.040.702.000 adalah retribusi dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

Adapun rincian Realisasi Pendapatan tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel II.2 dibawah ini :

Table : II.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Kode Rekening	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KET SISA / (KURANG)
1.16.1.20.30.00.0 0.000.4.1.2.03.01	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	2.400.000.000	2.040.702.000	85,02	(359.298.000)
	Total	2.400.000.000	2.040.702.000	85,02	(359.298.000)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pemalang menangani perijinan non berusaha sebanyak 44 jenis ijin. Sedangkan untuk perijinan berusaha menggunakan system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2021 Sebagaimana tabel II.3

Tabel II.3
Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Ijin	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
2	Izin Usaha Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
3	Izin Prinsip	98	90	0	78	63	1
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	230	172	1	124	134	0
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	40	39	0	38	33	0
6	Izin Lokasi	15	15	0	15	15	0
7	Izin Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0	0	0	0
8	Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0	0	0	0
9	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	2	2	0	5	4	0
10	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0	0	0	0
11	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	0	0	0
12	Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	61	61	0	58	58	0
13	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	1	1	0	1	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
14	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	6	6	0	5	4	0
15	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	0	0	0	0	0	0
16	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	0	0	0	0	0	0
17	Izin Reklame						
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	313	308	0	320	320	0
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	16	6	1	12	8	1
18	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	0	0	0	1	1	0
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	0	0	0	0	0	0
19	Izin Instalasi Listrik	0	0	0	0	0	0
20	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0	0	0	0
21	Izin Penyalur Petir	0	0	0	0	0	0
22	Izin Pesawat Lift	0	0	0	0	0	0
23	Izin Instalasi Kebakaran	0	0	0	0	0	0
24	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0	0	0	0
25	Izin Usaha Angkutan	1	2	0	0	0	0
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	83	81	0	15	15	0
	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0	0	0	0
27	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	17	18	0	8	8	0
28	Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0	0	0	0
	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	1	1	0	0	0	0
30	Tanda Daftar Gudang (TDG)	16	15	0	6	6	0
	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	7	6	-	24	24	0
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	-
31	Izin Usaha Industri (IUI)	6	5	0	8	8	0
	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	-	-	-	-	-	-
32	Surat Ijin Operasional Panti	2	2	0	5	5	0
33	Izin Pemakaman	30	30	0	35	35	0
34	Izin Pengabuan Mayat	12	12	0	18	18	0
35	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0	0
36	Izin Penyelenggaraan Optikal	1	1	0	0	0	0
37	Izin Pendidikan Dasar	0	0	0	11	11	0
38	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	5	5	0			
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	4	4	0	7	3	0
	- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0	0	0	0
39	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D	3	1	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Izin Operasional Tetap Klinik	10	10	0	10	10	0
40	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan						
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	57	62	0	106	105	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	5	5	0	23	20	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	154	128	0	232	179	0
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	0	0	0	0	0	0
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	339	362	0	440	431	0
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	50	45	0	160	160	0
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	16	16	0	46	46	0
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	3	5	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	2	2	0	5	5	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	25	25	0	29	27	0
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	1	1	0	3	3	0
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	0	0	0	8	8	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	39	40	0	49	48	0
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	249	246	0	195	189	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	29	29	0	36	33	0
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	9	9	0	17	17	0
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	1	1	0	4	4	0
	-Surat Izin Tukang Gigi	0	0	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	0	0	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0
	-Surat izin praktik psikolog Klinis (SIPPK)	2	2	0	0	0	0
41	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0
42	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	2	2	0	0	0	0
43	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan						
	- Izin Apotek (SIA)	29	27	0	85	85	0
	- Izin Toko Obat	13	12	0	3	3	0
	- Izin Toko Alat Kesehatan	1	1	0	0	0	0
44	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	230	193	0	231	230	0
45	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	2	0	0	1	0	0
46	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0			
47	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0
48	Izin Pembangunan dan	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	Pengembangan Perumahan						
49	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	0	0	0	0	0	0
50	Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	0	0	0	0	0	0
51	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
52	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21	20	0	0	0	0
53	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
54	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)						
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	3	3	0	1	1	0
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	0	0	0	4	3	0
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	0	0	0	0	0	0
	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	0	0	0	0	0	0
55	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	72	63	0	81	81	0
56	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	0	0	0	0	0	0
57	Izin Lingkungan	15	14	0	6	6	0
58	Izin Membuka Tanah	0	0	0	0	0	0
59	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	217	217	0	160	160	0
60	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	0	0	0
61	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	24	22	0	119	117	0
62	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
63	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
64	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
65	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0	0	0	0
66	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0	0	0	0
	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0	0	0	0
67	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0	0	0	0
68	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
69	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0
70	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul local	0	0	0	0	0	0
71	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
72	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
73	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0
74	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
75	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
76	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	0	0	0
77	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
78	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
79	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten						
80	Izin Insidental	0	0	0	0	0	0
81	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	14	14	0	6	6	0
	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	2	2	0	1	1	0
82	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
83	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	3.924	3.924	0	5.249	5.249	0
84	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
85	Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	8	4	0	0	0	0
86	Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
87	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	0	0	0	0	0	0
	Izin Usaha Peternakan	3	3	0	0	0	0
	Tanda Daftar Usaha Peternakan	10	9	0	3	3	0
	Izin Praktek Dokter Hewan	0	0	0	0	0	0
	Izin Klinik Hewan	0	0	0	0	0	0
88	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	0	0	0	0	0	0
89	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0	0	0	0
90	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	0	0	0	0	0	0
91	Izin Usaha Toko Modern	0	0	0	0	0	0
92	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	0	0	0	0	0	0
93	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	6.544	6.416	4	8.119	8.014	3

Capaian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak tercapai Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pada bulan Agustus Tahun 2021

Izin Mendirikan Bangunan di ganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau biasa di sebut PBG. Dikarenakan belum adanya perda tentang PBG maka izin Persetujuan Bangunan Gedung belum bisa dikeluarkan. Artinya realisasi Retribusi IMB sebesar Rp. 2.040.702.000 adalah retribusi dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

Adapun rincian Realisasi Retribusi selama dua tahun terakhir Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana tabel II.4

Table II.4
Realisasi Retribusi Dua Tahun Terakhir
(Tahun 2020 dan Tahun 2021)

No	Jenis Perijinan	Retribusi Tahun 2020		Retribusi Tahun 2021		Ket
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	IMB	2.220.000.000	2.130.681.500	2.400.000.000	2.040.702.000	
2	Retribusi Izin Gangguan/ HO				-	
Jumlah		2.220.000.000	2.130.681.500	2.400.000.000	2.040.702.000	85,02%

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat memenuhi target Indikator Kinerja Utama dengan maksimal yaitu Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) 3,13% dari target 1%, relisasi Nilai IKM 87,36 dari target 83,60, hal ini dikarena :

- a) Membuat kajian – kajian secara terus menerus terhadap regulasi yang ada untuk memudahkan investor untuk berinvestasi.
- b) Adanya Pengusaha yang melaporkan usahanya melalui LKPM meskipun tingkat kesadaran pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal melalui LKPM belum optimal .

Walaupun pada tahun 2021 ada pandemic covid 19, namun demikian tidak berdampak signifikan terhadap realisasi investasi di Kabupaten Pemalang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasion al	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisi s
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)		Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	1%	2%	3%	4%	3,13%	-40,45	3%	4%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	83,6	83,8	84,0	84,2	87,36	87,61	84,0	84,2	
3	Persentase peningkatan jumlah investor			2,95	3,00	3,05	3,10	-40	-57,14	3,05	3,10	
4	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal			100	100	100	100	0	50	100	100	
5	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal			95	95	96	96	98,71	95,07	96	96	
6	Persentase pelakuusaha yang memberikan pelaporan tepat waktu			40	42	44	46	85,71	100	44	46	
7	Persentase realisasi perizinan			100	100	100	100	160,28	117,16	100	100	

No	Indikator	SPM* nasional	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisi s
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			35	36	37	38	21	9	37	38	
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			168.157.3 32.081	171.520.4 78.722	176.666.09 3.083	183.732.7 36.806	171.698.90 0.267	102.242.19 7.878	176.666.0 93.083	183.732.7 36.806	

2.3 Hasil evaluasi SAKIP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja tahun 2021 dan tahun 2022, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai skor **61,15** dengan kategori B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai B merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.6
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 - 2022

No	Komponen	Bobot	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	21,81	22,18	21,6
2	Pengukuran Kinerja	25	10,31	10,31	18
3	Pelaporan Kinerja	15	7,59	7,59	10,5
4	Evaluasi Intenal	10	1,33	2,74	11,5
5	Capaian Kinerja	20	14,25	14,25	
Jumlah		100%	55,31	57,08	61,15

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain terdiri dari 8 Area Penilaian diantaranya Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur, Area Pengatan Akuntabilitas, Area Pengawasan, dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai skor terbaik dengan peringkat terbaik diantara Perangkat Daerah lain dengan nilai **22,64**. Penilaian tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memiliki Reformasi Birokrasi yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai skor **22,64** merupakan Jumlah akumulasi penilaian terhadap komponen Pemenuhan sebesar **9,14** dan Komponen Reform sebesar **13,50** manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.7

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Komponen	Bobot	Pemenuhan dan Reform		
			2020	2021	2022
Pemenuhan					
1	Area Manajemen Perubahan	2,00	1,20	1,27	1,35
2	Area Deregulasi Kebijakan	1,00	0,50	0,50	0,50
3	Area Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	0,92	0,58	1,17
4	Area Penataan Tata Laksana	1,00	0,64	0,64	0,22
5	Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur	1,40	0,94	0,89	1,00
6	Area Pengatan Akuntabilitas	2,50	2,01	2,01	1,68
7	Area Pengawasan	2,20	1,85	1,62	1,18
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,80	1,78	2,04
Total		14,60	9,86	9,29	9,14
Reform					
1	Area Manajemen Perubahan	3,00	2,54	2,54	0,82
2	Area Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00	1,50

3	Area Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	0,75
4	Area Penataan Tata Laksana	3,75	3,59	3,59	1,81
5	Area Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur	2,00	1,25	1,00	1,25
6	Area Pengatan Akuntabilitas	3,75	2,42	2,17	2,09
7	Area Pengawasan	1,95	1,95	1,83	1,95
8	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,64	3,22	3,34
Total		2,70	18,88	17,85	13,50
Jumlah		100%	28,74	27,13	22,64

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

2.4.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan investasi. Hal ini dikarenakan :
 - a. Pemalang belum memiliki kawasan industri yang dikelola Pemerintah, padahal berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki kawasan peruntukan industri seluas 1.909,04 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan.
 - b. Harga tanah yang relatif tinggi.
 - c. Surat Keputusan Menteri ATR terkait Penetapan Lahan Sawah Dilindungi
 - d. Belum selesainya perbup Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - e. Belum tersedianya infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal, dikarenakan pelaku usaha lebih mementingkan untuk menjalankan usahanya dibandingkan dengan harus mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Pelaku usaha yang

baru pada tahun 2021 sebanyak 21 pelaku usaha, hanya 18 pelaku usaha yang melakukan pelaporan realisasi investasi tepat waktu.

3. Belum ada pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik. Dengan adanya mal pelayanan publik akan memberikan kemudahan pelayanan perijinan pada pelaku usaha sehingga akan menarik bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pematang Jaya.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pematang Jaya periode Tahun 2021 – 2026.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pematang Jaya semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya perlu meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan Penanaman Modal adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Promosi Penanaman Modal
3. Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal
5. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, dan
6. Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdampak positif untuk ikut meningkatkan kemakmuran /kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pemalang terkait investasi yaitu harus siap untuk menghadapi persaingan global dalam usaha menarik investor untuk berinvestasi. Isu strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu perlu untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan investasi maka perlu adanya langkah-langkah yang kongkrit/nyata.

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal :

Didukung 2 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

- b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal :

Didukung 1 program

- a) Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Indikatornya : Presentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu

3. Belum adanya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik

Didukung 2 program

a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

2.4.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dengan di keluarkanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat dan mengatur proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat maka di harapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Kabupaten Pematang Jaya.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Permenpan RB tersebut berisi tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengampu tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dengan adanya Refocusing Anggaran yang semula Mal Pelayanan Publik akan di bangun di Tahun 2021 ini tidak dapat terlaksana di karenakan anggaran untuk Mal Pelayanan Publik di alihkan untuk Pemulihan Ekonomi. Untuk menindaklanjuti Isu tersebut diatas maka pada tahun 2022 ini Mal Pelayanan Publik akan segera di bangun dengan merehab gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya, dengan target Lonching pada bulan Oktober tahun 2022.

Tabel. II.8
Analisis SWOT

<p>ISU STRATEGIS</p>	<p>KEKUATAN (STRENGTH)</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pemalang Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pemalang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Investasi (Gerai Investasi) 	<p>KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal Belum adanya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik
<p>PELUANG (OPPORTUNITY)</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja Pembangunan Mall Pelayanan Publik Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat sebagai media promosi Penanaman Modal 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Promosi Penanaman Modal Peningkatan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
<p>TANTANGAN (THREAT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya konflik kepentingan baik social ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan usaha dan pekungannya tepat waktu Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<p>STRATEGI WT</p>

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu :

Visi : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI”

Misi ada 6 yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan Berkesinambungan.

Sejalan visi dan misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati ke 2 yaitu “ **MAKMUR** “ dan Misi ke 5 yaitu “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Lokal**“

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2023 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana, dengan fokus pada :
 - a) Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil, peningkatan pengelolaan

sentra dan kluster industri berbahan baku lokal, pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN), serta penguatan SIINAS

- b) Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.
2. Penguatan Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dengan fokus pada :
- a) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, Bumdes dan Bumdesma), peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM, peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial.
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun program, Kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun berjalan atau tahun 2022.

Tabel II.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.456.969.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.456.969.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	69.472.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	69.472.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.407.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.407.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			RKASKPD					Dokumen RKASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	8.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	8.520.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	6.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	7.380.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	7.380.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.665.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.665.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	3.725.817.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	3.725.817.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 OB	3.707.857.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 OB	3.707.857.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan	Dinas	Jumlah Dokumen	2	7.960.000	Penyusunan	Dinas	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	7.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PMPTSP	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PMPTSP	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	27.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	27.600.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	27.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	27.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	258.660.279	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	258.660.279	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7.000.000	
	Penyediaan	Dinas	Jumlah Paket Bahan	12 Bulan	135.217.600	Penyediaan	Dinas	Jumlah Paket	12 Bulan	135.217.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bahan Logistik Kantor	PMPTSP	Logistik Kantor yang Disediakan			Bahan Logistik Kantor	PMPTSP	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	35.030.679	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	35.030.679	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	6.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,280,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,280,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	74.132.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	74.132.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35,335,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35,335,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,335,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,335,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	662.083.408	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	662.083.408	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500 surat	13.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500 surat	13.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	166.725.056	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	166.725.056	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	34 Orang/Bulan	481.858.352	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	34 Orang/Bulan	481.858.352	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang	100%	678.000.813	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan	100%	678.000.813	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		milik daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang milik daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	129.022.148	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	129.022.148	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17Unit	60.998.965	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17Unit	60.998.965	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	462.998.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	462.998.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	33 Unit	24.981.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dinas PMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	33 Unit	24.981.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3%	83.914.500	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL penetapan Pemberian	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3%	83.914.500	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	57.809.000	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	57.809.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	57,809,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	57,809,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kemudahan Penanaman Modal					Penanaman Modal					
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	26.105.500	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	26.105.500	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26.105.500	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	26.105.500	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	109.980.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	109.980.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	176.666.093.000	109.980.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	176.666.093.000	109.980.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	19.980.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.980.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	90.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	90.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	96%	162.029.236	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	96%	162.029.236	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	162.029.236	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	162.029.236	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.250 Pelaku Usaha	40.268.236	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.250 Pelaku usaha	40.268.236	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	250 kali kegiatan cek lokasi	56.761.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	250 kali kegiatan cek lokasi	56.761.000	
	Penyediaan Layanan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	4 Orang	65.000.000	Penyediaan Layanan	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang	4 Orang	65.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	44%	301.321.500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	44%	301.321.500	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	301.321.500	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	301.321.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha	6.105.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha	6.105.500	
	oordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Pelaku Usaha	227.262.000	oordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Pelaku usaha	227.262.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	67.954.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	67.954.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	30.370.764	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	30.370.764	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	30.370.764	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	30.370.764		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	30.370.764	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	30.370.764		
JUMLAH TOTAL						6.144.585.000						6.144.585.000

2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berasal dari 2 item, yang pertama dari tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan yang kedua dari hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat :
 1. Untuk lebih meningkatkan lagi kecepatan waktu pelayanan
 2. Tempat duduk pemohon kurang
 3. Tidak adanya kotak saran
 4. Jam pelayanan hanya setengah hari
 5. Tempat parkir kurang luas
- b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 :
 1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha terkait pelaporan LKPM melalui sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah
 2. Perlu adanya pendampingan dari pemerintah terkait pengisian pelaporan LKPM

Dari hasil usulan masyarakat diatas maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang akan di akomodir pada Sub Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan untuk pendampingan pengisian pelaporan LKPM akan di akomodir pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatua;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun 2023 yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**.

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Investasi/ BKPM

Visi yang dirumuskan adalah :

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8

(delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

Misi (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sementara itu BKPM juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs),
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

- c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
 - d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,
 - e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
 - f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
 - g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:
- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
 - b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal
 - c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi,
 - d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
 - e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor,
 - f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
 - g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah (DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah)

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 yang menjadi arah Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Strategi :

- Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;

- Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
 - Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
 - Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas

Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

- Pemberian kemudahan perizinan investasi
- Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
- Mengembangkan digital investment promotion;
- Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- Mendorong perwujudan investasi hijau.

Dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi jika menilik dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah sejalan.

4. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada tahun kedua penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**, dengan prioritas pada :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan

sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS;

- b. Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor;

Target sasaran makro pembangunan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Angka kriminalitas sebanyak 180 kasus;
2. Indeks Risiko Bencana sebesar 148;
3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 66,58;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,17;
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,13;
6. Indeks Kebudayaan sebesar 48,9;
7. Indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,94;
8. Angka kemiskinan sebesar 15,39 persen;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,20 persen;
10. Indeks Desa Membangun sebesar 0,7672;
11. Indeks ketimpangan antar wilayah sebesar 0,37800;
12. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71 persen;
13. Laju Inflasi sebesar 2,36 persen;
14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 71,18;
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebesar 69,37.

Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
1.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar.	a. Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), penguatan database gender dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak;
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi	a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri

		<p>dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS;</p> <p>b. Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor;</p>
3	Masih tingginya kesenjangan antar wilayah	a. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah;
4	Belum optimalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan inovasi daerah	<p>a. Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.</p> <p>b. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi;</p>
5	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan	a. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM.

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang.

3. Pemutahiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi serta informasi terkait dengan perijinan dan non perijinan.
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah.
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan di Kabupaten Pematang dan produk – produk UMKM dengan melakukan pameran, promosi melalui website gerai investasi dan media sosial lainnya.
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM.
7. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pematang. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 5 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal“ Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2023 adalah Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pematang tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, seperti diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Investasi (PMA dan PMDN)	%	3
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,0

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mengatasi Permasalahan dan isu Strategis Pada tahun 2023 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal :
Didukung 2 program
 - a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.
Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.
 - b) Program Promosi Penanaman Modal
Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal
2. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pelaporan penanaman modal :
Didukung 1 program
 - a) Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Indikatornya : Presentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu
3. Belum adanya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik
Didukung 2 program
 - a) Program Pelayanan Penanaman Modal
Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal
 - b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang juga mendukung program unggulan bupati yaitu Kota Industri (KOIN). Melalui program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan informasi tentang peta potensi penanaman modal di kabupaten pemalang.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2023 yaitu mengampu **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal :**

Permasalahan di bidang penanaman modal yang menjadi prioritas pembangunan daerah :

1. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan baik pusat dan daerah dalam satu tempat (Belum Terpadu satu pintu). Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- a) Program urusan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. Belum Optimalnya Promosi Penanaman Modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
 - a) Program promosi penanaman modal
3. Belum optimalnya pemberian informasi (Profil Potensi Investasi, Lahan dan Peta Kawasan Industri serta Infrastruktur Pendukung). Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
 - a) Program promosi penanaman modal
4. Belum terimplementasinya pemberian insentif bagi investor dan Belum optimalnya Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
 - a) Program pengembangan iklim penanaman modal
 - b) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Belum Optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal. Program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :
 - a) Program Pelayanan penanaman modal

Dari lima permasalahan diatas, maka rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

Tabel 4.1
MATRIK RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
I.	URUSAN PENANAMAN MODAL				687,616,000				687,616,000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	Dinas PMPTSP	3%	83.914.500	DAU		3%	83.914.500
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	100%	57.809.000	DAU		100%	57.809.000
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	57,809,000	DAU		2 Dokumen	57,809,000

RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi investasi		100%	26.105.500	DAU		100%	26.105.500
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	26.105.500	DAU	1	1 Dokumen	26.105.500
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	100%	109.980.000	DAU		100%	109.980.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi	Dinas PMPTSP	176.666.093.000	109.980.000	DAU		183.732,737.000	109.980.000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	19.980.000	DAU	1	1 Dokumen	19.980.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	90.000.000	DAU	1	1 Dokumen	90.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	96%	162.029.236	DAU		96%	162.029.236

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perijinan yang disetujui	Dinas PMPTSP	100%	162.029.236	DAU		100%	162.029.236
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas PMPTSP	5.250 Pelaku Usaha	40.268.236	DAU		5.250 Pelaku Usaha	40.268.236
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	250 kali kegiatan cek lokasi	56.761.000	DAU		250 kali kegiatan cek lokasi	56.761.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP	4 Orang	65.000.000	DAU		4 Orang	65.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	Dinas PMPTSP	44%	301.321.500	DAU		44%	301.321.500
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	100%	301.321.500	DAU		100%	301.321.500
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	15 Kegiatan Usaha	6.105.500	DAU		15 Kegiatan Usaha	6.105.500
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	8 Pelaku Usaha	227.262.000	DAU		8 Pelaku Usaha	227.262.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Dinas PMPTSP	100 Kegiatan Usaha	67.954.000	DAU		100 Kegiatan Usaha	67.954.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi perijinan	Dinas PMPTSP	100%	30.370.764	DAU		100%	30.370.764

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	Dinas PMPTSP	100%	30.370.764	DAU		100%	30.370.764
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	30.370.764	DAU		1 Dokumen	30.370.764
II	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				5,456,969,000				5,456,969,000
12.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	100%	5.456.969.000	DAU		100%	5.456.969.000
12.18.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas PMPTSP	100%	69.472.500	DAU		100%	69.472.500
12.18.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	6.407.200	DAU		2 Dokumen	6.407.200

RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Daerah								
12.18.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen 10.000.000	
12.18.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	8.520.000	DAU		1 Dokumen 8.520.000	
12.18.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	6.500.000	DAU		1 Dokumen 6.500.000	
12.18.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	7.380.000	DAU		1 Dokumen 7.380.000	
12.18.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	7.000.000	DAU		1 Dokumen 7.000.000	
12.18.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	23.665.300	DAU		2 Dokumen 23.665.300	
12.18.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	Dinas PMPTSP	100%	3.725.817.000	DAU		100% 3.725.817.000	
12.18.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	26 OB	3.707.857.000	DAU		26 OB 3.707.857.000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12.18.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
12.18.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	2 Dokumen	7.960.000	DAU		2 Dokumen	7.960.000
12.18.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	100%	27.600.000	DAU		100%	27.600.000
12.18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMPTSP	2 Jenis	27.600.000	DAU		2 Jenis	27.600.000
12.18.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	100%	258.660.279	DAU		100%	258.660.279
12.18.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	7.000.000	DAU		12 Bulan	7.000.000
12.18.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	135.217.600	DAU		12 Bulan	135.217.600
12.18.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	35.030.679	DAU		12 Bulan	35.030.679

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12.18.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PMPTSP	12 Bulan	6.000.000	DAU		12 Bulan	6.000.000
12.18.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	12 Laporan	1,280,000	DAU		12 Laporan	1,280,000
12.18.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	50 Laporan	74.132.000	DAU		50 Laporan	74.132.000
12.18.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	100%	35,335,000	DAU		100%	35,335,000
12.18.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas PMPTSP	3 Unit	35,335,000	DAU		3 Unit	35,335,000
12.18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas PMPTSP	100%	662.083.408	DAU		100%	662.083.408
12.18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	5.500 surat	13.500.000	DAU		5.500 surat	13.500.000
12.18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Dinas PMPTSP	12 Bulan	166.725.056	DAU		12 Bulan	166.725.056

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Disediakan							
12.18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas PMPTSP	34 Orang/ Bulan	481.858.352	DAU		34 Orang/ Bulan	481.858.352
12.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	Dinas PMPTSP	100%	678.000.813	DAU		100%	678.000.813
12.18.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas PMPTSP	22 Unit	129.022.148	DAU		22 Unit	129.022.148
12.18.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PMPTSP	17Unit	60.998.965	DAU		17Unit	60.998.965
12.18.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMPTSP	1 Unit	462.998.500	DAU		1 Unit	462.998.500
12.18.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas PMPTSP	33 Unit	24.981.200	DAU		33 Unit	24.981.200

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung Program Unggulan Bupati Kota Industri (KOIN) terdiri dari 6 Program 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, 4 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang


KHAERON, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680323 199003 1 012